

## **PERAN UNIT KERJASAMA MILITER MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT DALAM KERJASAMA HUBUNGAN LUAR NEGERI DI BIDANG MILITER**

Yusep Ginanjar

Universitas Jenderal Achmad Yani

*Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531*

Alamat email koresponden: [Yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id](mailto:Yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id)

### **ABSTRAK**

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Kerjasama militer yang dibangun dan dikembangkan haruslah sejalan dengan kebijakan luar negeri RI yang senantiasa berorientasi kepada 3 (tiga) substansi dasar yaitu upaya yang simultan untuk membangun rasa saling percaya, pencegahan konflik dan mencari solusi bersama bila terdapat persengketaan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peran dan fungsi unit kerjasama militer mabas AD adalah untuk merumuskan serta mengkoodinasikan stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan.

**Kata kunci:** Kermamil, Unit Kerjasama Militer, Mabes AD, Kerjasama Internasional

### **PENDAHULUAN**

Salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah kerja sama antar negara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan posisinya menjadikan pertahanan negara tidak hanya berdimensi nasional, melainkan juga internasional (Aditya, G.D., Hardiwinoto, S. and Setiyono, J., 2016). Hal ini mendorong Indonesia untuk mengembangkan kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain dalam mendukung tercapainya kepentingan nasional di bidang pertahanan. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan membangun kerja sama internasional dengan tetap berpedoman pada prinsip sebagai negara nonblok yang tidak melakukan aliansi dengan negara manapun. Namun demikian, Indonesia tetap berupaya secara aktif dalam percaturan

internasional guna terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup regional maupun global (Pratewa, L., 2017).

Kerja sama internasional bidang pertahanan diselenggarakan untuk membangun sikap saling percaya antarnegara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrumen dalam mencegah konflik antarnegara (Tungga, D.C.K., 2016). Kerja sama tersebut juga bertujuan membangun kapasitas pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerja sama industri pertahanan. Kerja sama internasional dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan yang akan diefektifkan melalui langkah-langkah konkret dan saling menguntungkan. Sejalan dengan itu, kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan (Buku Putih Pertahanan, Kemhan, 2015).

Pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pemerintah RI melaksanakan politik bebas aktif dalam berinteraksi dengan dunia internasional, sehingga pemerintah RI bebas menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada suatu kekuatan dunia serta aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah RI sesuai yang diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, senantiasa mengorientasikan setiap hubungan luar negerinya pada pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan hal tersebut maka peran TNI dalam membangun kerjasama militer menjadi salah satu hal yang esensial dalam meningkatkan keamanan negara mengingat isu-isu keamanan di lingkup regional dan global yang semakin kompleks. Meskipun Indonesia mengembangkan pertahanan yang mandiri, dalam pengertian tidak menyandarkan kepentingan pertahanan pada negara lain, Indonesia tetap menganut prinsip menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain melalui kerjasama dibidang pertahanan berupa kerjasama dengan militer dari negara sahabat. Peningkatan kerjasama militer menjadi semakin penting untuk ditingkatkan seiring dengan perkembangan isu-isu keamanan di lingkup regional dan global yang memerlukan penanganan bersama. Kerjasama militer yang dibangun dan dikembangkan haruslah sejalan dengan kebijakan luar negeri RI yang senantiasa berorientasi kepada 3 (tiga) substansi dasar yaitu upaya yang simultan untuk membangun rasa saling percaya, pencegahan konflik dan mencari solusi bersama bila terdapat persengketaan (Buku Putih Pertahanan, Kemhan, 2008).

Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan keamanan pertahanan negara Indonesia, maka TNI harus mengupayakan dan menjunjung tiga aspek substansi dasar tersebut. Untuk dapat mengimplementasikan hal tersebut TNI AD memiliki unit khusus dalam bidang kerjasama militer yang berfokus pada kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang militer baik bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Hal ini digunakan berdasarkan pertimbangan pertanyaan dan tujuan penelitian yang akan menggambarkan peran unit kerjasama militer markas besar angkatan darat dalam kerjasama hubungan luar negeri di bidang militer. Pendekatan penelitian kualitatif bertumpu kepada pendekatan narasi dari fakta yang ditemukan dilapangan, adapun jenis data yang digunakan lebih cenderung data primer dan sekunder yang di dapat

dari penelurusan dilapangan berupa hasil wawancara dan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2015).

## PEMBAHASAN

Berdasarkan tiga aspek dasar kebijakan luar negeri Indonesia unit kerjasama militer markas besar angkatan darat memiliki sasaran yang bernilai strategis (*peak value*) yang mana hal tersebut sekaligus sebagai tahapan yang dikembangkan dalam rangka membangun kerjasama militer dengan negara lain. Kondisi yang diharapkan atas implementasi kerjasama militer (sesuai Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/89/XII/2009) dengan negara lain yang sejalan dengan tingkatan pelaksanaan substansi dasar kerjasama militer antara lain (Arh Kuat Budiman, 2014):

1. Menciptakan kepercayaan dan meningkatkan persahabatan (*Confidence Building Measure*), dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Terwujudnya hubungan persahabatan yang lebih kondusif dan saling menguntungkan antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Negara sahabat;
  - b. Terwujudnya rasa saling menghormati dan itikad baik untuk menjaga hubungan bilateral dalam memandang suatu potensi konflik yang dapat bermuara kepada persengketaan;
  - c. Terselenggaranya kerjasama militer yang saling menguntungkan, bertingkat dan berlanjut.
2. Mengupayakan diplomasi pencegah konflik (*Preventive Diplomacy*), dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Menurunnya tingkat eskalasi konflik dan pertikaian antara TNI dengan AB Negara lain;
  - b. Meningkatnya pengaruh dan diplomasi TNI dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan dan mencegah konflik di kawasan regional;

- c. Pengakuan dan penerimaan peran dan kontribusi TNI sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pada skala regional dan internasional.
3. Meningkatkan kemampuan militer dan pertahanan (*Defence Capacity*), dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas personel TNI;
  - b. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi operasional TNI dalam melaksanakan tugas pokok TNI;
  - c. Mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan terhadap Alutsista guna melaksanakan tugas pokok TNI.
4. Meningkatkan keamanan kawasan (*Security Enhancement*) dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya keamanan dan menurunnya tingkat kejahatan transnasional di wilayah nasional dan di wilayah regional;
  - b. Tersusunnya Standard Operating Procedures Multinational Forces (SOP MNF) guna memelihara keamanan di kawasan regional;
  - c. Meningkatnya pengakuan dunia terhadap peran dan kontribusi TNI dalam upaya memelihara stabilitas keamanan kawasan regional.
5. Melaksanakan misi damai dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pemeliharaan perdamaian dunia, dengan sasaran sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya kemampuan dan peran serta TNI dalam misi damai di forum internasional untuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana;
  - b. Meningkatnya pengakuan dunia terhadap profesionalitas Satgas TNI pada misi perdamaian PBB;

- c. Terpenuhinya standar kemampuan Alutsista dan peralatan pendukung yang dipersyaratkan kepada Satgas TNI pada misi perdamaian PBB.

Dengan kata lain melalui upaya nyata untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dijelaskan maka niscaya TNI akan mampu mengeksplorasi nilai-nilai strategis yang menjadi “*peak value*” dari kerjasama militer guna pengembangan institusi TNI kearah yang lebih baik dari segi organisasi, doktrin, taktik maupun teknik kemiliteran demi tercapainya profesionalitas kemiliteran yang mumpuni.

### **Peran dan Fungsi Unit Kerjasama Militer Mabes AD**

Adapun peran dan fungsi dari unit kerjasama militer mabes AD sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan staf terkait dengan bidang Kerjasama Militer meliputi kerjasama latihan dan latihan bersama militer regional ASEAN dan Non ASEAN.
- b. Merumuskan pertimbangan dan saran staf tentang hasil-hasil koordinasi dan pengawasan semua pekerjaan/ kegiatan staf terkait dengan bidang kerjasama militer meliputi kerjasama latihan dan latihan bersama militer regional ASEAN dan Non ASEAN.
- c. Merumuskan kebijakan tentang kerjasama latihan dan latihan bersama militer regional ASEAN dan Non ASEAN.
- d. Merumuskan kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi dan anggaran kegiatan kerjasama latihan dan latihan bersama militer regional ASEAN dan Non ASEAN.
- e. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan/program dan anggaran kerjasama latihan dan latihan bersama militer regional ASEAN dan Non ASEAN.

Berdasarkan hal tersebut bahwa peran dan fungsi unit kerjasama militer mabes AD adalah untuk merumuskan serta mengkoordinasikan

stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan. Dengan demikian, unit kerjasama militer mempunyai peran penting dalam terlaksananya kerjasama militer yang dilakukan. Peran unit kerjasama militer Mabes AD mempunyai strategis dalam menentukan kerjasama militer yang mampu meningkatkan keamanan dan pertahanan negara Indonesia.

### **Visi dan Misi Unit Kerjasama Militer Mabes AD**

Secara umum visi dan misi diwujudkan dalam bentuk tujuan dan sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tujuan. Mewujudkan kerja sama bilateral dan multilateral serta Latihan Bersama bilateral dan multilateral antara TNI AD dengan Angkatan Darat negara sahabat untuk menciptakan kepercayaan **(trust)**, meningkatkan persahabatan **(friendship-equal)** dan kemampuan militer serta pertahanan di antara kedua belah pihak **(professionalism)**.
- b. Sasaran.
  - 1) Terwujudnya kerja sama bilateral dan multilateral antara TNI AD dengan Angkatan Darat negara sahabat sebagai kesepakatan Bersama antara kedua Angkatan Darat yang dapat mewadahi kepentingan pengembangan pertahanan matra darat sesuai dengan kebijakan kedua belah pihak.
  - 2) Terwujudnya Latihan Bersama bilateral dan multilateral antara TNI AD dengan Angkatan Darat negara sahabat yang memiliki taktik, teknik, standar dan prosedur tetap yang berbeda untuk meningkatkan profesionalitas prajurit TNI AD.

### **Program Unit Kerjasama Militer dalam Kerjasama Hubungan Luar Negeri**

Program kegiatan kerjasama militer yang dilakukan TNI AD khususnya berfokus pada dua hal yaitu Kerja sama militer dan latihan

bersama militer baik di regional ASEAN maupun Non ASEAN. Program kerjasama militer yang dilakukan TNI AD antara lain (Anwar, S., 2018):

### 1. **Kerja sama latihan**

Kerja sama latihan adalah salah satu bentuk kerja sama antara TNI AD dan Angkatan Darat negara sahabat untuk mempererat hubungan militer melalui kegiatan rapat, kunjungan perwira tinggi, pertukaran personel, interaksi perwira senior/junior, pendidikan, seminar serta lokakarya. Contoh Kegiatan:

#### a. Dengan Angkatan Darat negara sahabat di kawasan regional ASEAN:

- 1) *Joint Army Working Group (JAWG)* dengan AD Singapura.
- 2) *Tim Perancang Latihan Darat (TPLD)* dengan AD Malaysia.
- 3) *Indonesia-Philippine Army Working Group (Indophil-AWG)* dengan AD Filipina.
- 4) *Thailand-Indonesia Joint Army Working Group (TIAJWG)* dengan AD Thailand.
- 5) *Army to Army Talks* dengan AD Kamboja.
- 6) *Personnel Exchange Program (PEP) Combat Instructor Training Singapura*.
- 7) *Personnel Exchange Program (PEP) HQ Singapore Artillery* dengan *Yonarmed Kostrad*.
- 8) *Professional Interaction Program (PIP)* antara *Kostrad* dengan *3<sup>rd</sup> Division SAF*.
- 9) *Subject Matter Expert Exchange Cyber Warfare* dengan AD Thailand.

#### b. Dengan Angkatan Darat negara sahabat NON ASEAN:

- 1) *Army Staff Talks (AST)* dengan AD Amerika Serikat.
- 2) *Army Staff Talks (AST)* dengan AD Australia.
- 3) *Army Games Observer* ke Rusia.
- 4) *Path and Paces Observer* ke Pakistan.



- 5) *Personnel Exchange Program (PEP) Astros Brasil.*
- 6) *Personnel Exchange Program (PEP) Cesar 155 mm Perancis.*

## 2. **Latihan bersama**

Merupakan salah satu bentuk kerja sama antara TNI AD dan Angkatan Darat negara sahabat untuk meningkatkan kemampuan prajurit dengan mengaplikasikan taktik dan teknik latihan masing-masing secara bersamaan. Contoh kegiatan:

a. Dengan Angkatan Darat negara sahabat di kawasan regional ASEAN :

- 1) *Latma Kilat Sakti* antara Kopassus dengan RPK Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam.
- 2) *Latma Keris Satria* antara Ki Taipur Kostrad dengan RPK ABDB.
- 3) *Latma Tiger* antara Kopassus dengan Special Warfare Command (SWCOM) AD Thailand.
- 4) *Latma Dolphine* antara Kopassus/Kostrad dengan SOCOM/FSSR AD Filipina.

b. Dengan Angkatan Darat negara sahabat NON ASEAN:

- 1) *Mobile Team Training (MTT) Security Force Asisstant Brigade (SFAB)* dengan AD Amerika Serikat.
- 2) *Junior Officer Combat Instructor Training (JOCIT)* dengan AD Australia.
- 3) *Latma JCET Vector Balance.*
- 4) *Latma Pasukan Khusus.*

Sejauh ini program-program kerjasama militer yang dilakukan mabes TNI AD sudah sesuai dengan harapan. Kesesuaian program kerjasama militer tersebut dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek fungsi. Sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat Lampiran VIII (Orgas Slatad) Masa Uji Coba, ditinjau dari aspek

fungsi saat ini sudah dapat dioperasionalkan dan dapat mendukung tugas TNI AD.

2. Ditinjau dari aspek struktur. Sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat Lampiran VIII (Orgas Slatad) Masa Uji Coba, sampai dengan saat ini ditinjau dari aspek struktur, dapat dioperasionalkan dengan baik.
3. Ditinjau dari aspek personel. Sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat Lampiran VIII (Orgas Slatad) Masa Uji Coba, belum terdapat Baur Data di bawah Pabandya -2/Latma ASEAN dan Non ASEAN.
4. Ditinjau dari aspek perlengkapan. Sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat Lampiran VIII (Orgas Slatad) Masa Uji Coba, ditinjau dari aspek perlengkapan saat ini sudah dapat dioperasionalkan dan dapat mendukung tugas TNI AD.

Berdasarkan hasil tinjauan dari berbagai aspek unit kerjasama militer mabes AD dalam menjalankan program kerjasama militer sudah sesuai dengan peraturan. Artinya, dari hasil fungsi pengawasan serta evaluasi kinerja dari unit kerjasama militer ini sudah cukup baik ditinjau dari peraturan yang berlaku kinerja yang ditunjukkan sudah sesuai harapan atau sesuai dengan peraturan kasad yang berlaku. Sejauh ini program berjalan sesuai rencana. Hal-hal yang tidak dapat terlaksana lebih karena kendala Covid-19, situasi politik negara dan kebijakan anggaran yang ada pada K/L oleh negara.

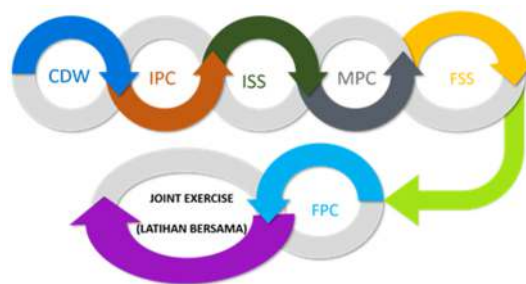
Sampai saat ini Kermamil Mabesad hanya melaksanakan Kerjasama militer dengan AD Negara sahabat. Kermamil Mabesad tidak melaksanakan dengan pihak-pihak non-negara. Untuk negara Non ASEAN, Kermamil

melaksanakan Kerjasama dengan 12 Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Jepang, Brazil, Perancis, Jerman, Inggris, India, Pakistan, Timor Leste dan Rusia. Untuk negara ASEAN, Kermamil melaksanakan Kerja Sama maupun Latihan dengan 7 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja dan Vietnam (Pratewa, L., 2017).

### **Mekanisme Kerjasama Luar Negeri**

Adapun mekanisme kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh unit kerjasama militer mabes AD sebagai berikut:

1. Latihan Bersama dengan skala besar dan memiliki kompleksitas yang tinggi memiliki tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut :



Sumber : Hasil penelitian, 2022

- a. Rapat perencanaan konsep awal (*Concept Development Workshop/CDW*). Maksud pelaksanaan Rapat CDW ini adalah membangun kesepahaman awal terhadap bagaimana konsep latihan bersama yang akan dilaksanakan oleh kedua Angkatan Darat.
- b. Rapat perencanaan awal (*Initial Planning Conference/IPC*). Merupakan kegiatan rapat awal perencanaan Latihan bersama yang melibatkan Staf Kermalat Slatad TNI AD, Kedubes negara sahabat, instansi terkait dan satuan yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara Latihan bersama, baik TNI AD maupun AD Negara Sahabat.
- c. *Initial Site Survey*. Merupakan kegiatan peninjauan medan awal yang dilaksanakan oleh penyelenggara latihan bersama

dengan perwakilan peserta latihan bersama dari Angkatan Darat Negara Sahabat.

- d. Rapat Perencanaan Pertengahan (*Middle Planning Conference*).
  - e. *Final Site Survey*.
  - f. Rapat perencanaan akhir (*Final Planning Conference/FPC*). merupakan giat rapat akhir/*final* penyiapan Latihan bersama yang melibatkan semua staf/satuan/pihak terkait mulai dari Staf Kernalat Slatad, Kedubes Negara Sahabat, Satuan yang akan ditunjuk sbg penyelenggara latihan bersama dari kedua negara, Komando Atas (Mabes TNI), perwakilan Mabes Angkatan (Mabes AL dan Mabes AU) Satkowil serta intnasi pemerintahan terkait. Kegiatan FPC ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan akhir/*final* tentang materi latihan, akomodasi latihan, kegiatan sinkronisasi semua komponen pendukung latihan bersama.
2. Latihan Bersama dengan skala yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki kompleksitas yang tinggi memiliki tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut :



Sumber: hasil penelitian, 2022

Rapat perencanaan latihan (*Exercise Planning Conference/EPC*). Merupakan kegiatan rapat perencanaan Latihan bersama yang melibatkan Staf Kernalat Slatad TNI AD, Kedubes negara sahabat, instansi terkait dan satuan yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara Latihan bersama, baik TNI AD maupun AD Negara Sahabat.

## **Faktor Pendukung Dan Penghambat Kerjasama Militer Luar Dalam Hubungan Luar Negeri**

Faktor pendukung kerjasama militer dalam hubungan luar negeri yaitu sebagai berikut:

1. Kesamaan Alutsista maupun persenjataan yang digunakan dapat mendukung pelaksanaan giat kerja sama.
2. Kebijakan kedua belah pihak untuk saling membina hubungan hingga memperoleh mutual trust dan mutual benefit bagi kedua negara.
3. Kebijakan/dukungan dari Komando Atas yang memiliki keinginan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan Latihan dengan AD negara lain.

Faktor penghambat kerjasama militer dalam hubungan luar negeri yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan situasi yang terjadi di salah satu negara dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dan Latihan.
2. Adanya kebijakan mengenai ketersediaan anggaran Latihan pada masing-masing negara sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
3. Perbedaan organisasi AD masing-masing negara dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Latma, sebagai Contoh: Satuan Arhanud TNI AD tidak dapat melaksanakan Latihan dengan Arhanud Singapura karena di Singapura, Arhanud berada di bawah komando Angkatan Udara.
4. Perbedaan doktrin, Alutsista dan persenjataan dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama maupun Latma.

## **SIMPULAN**

Peran dan fungsi unit kerjasama militer mabes AD adalah untuk merumuskan serta mengkoordinasikan stakeholder terkait dalam rangka kerjasama militer yang dijalin. Selain itu, unit kerjasama militer juga mempunyai fungsi pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari program kerjasama militer yang diselenggarakan. Dengan demikian, unit kerjasama

militer mempunyai peran penting dalam terlaksananya kerjasama militer yang dilakukan. peran unit kerjasama militer mabas AD mempunyai strategis dalam menentukan kerjasama militer yang mampu meningkatkan keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Sejauh ini program berjalan sesuai rencana. Hal-hal yang tidak dapat terlaksana lebih karena kendala Covid-19, situasi politik negara dan kebijakan anggaran yang ada pada K/L oleh negara.

Sampai saat ini Kermamil Mabes AD hanya melaksanakan Kerjasama militer dengan AD Negara sahabat. Kermamil Mabesad tidak melaksanakan dengan pihak-pihak non-negara. Untuk negara Non ASEAN, Kermamil melaksanakan Kerjasama dengan 12 Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Jepang, Brazil, Perancis, Jerman, Inggris, India, Pakistan, Timor Leste dan Rusia. Untuk negara ASEAN, Kermamil melaksanakan Kerja Sama maupun Latihan dengan 7 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja dan Vietnam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia. (Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). 2008
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia. (Jakarta : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia). 2015
- Kuat Budiman. 2014. Tinjauan Optimalisasi Kerjasama Militer TNI AD Menuju World Class Army. Artikel Paban V/Kermamil Sopsad
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/89/XII/2009
- Aditya, G.D., Hardiwinoto, S. and Setiyono, J., 2016. Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), pp.1-18.
- Tungga, D.C.K., 2016. *PENGARUH KEKUATAN MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP PEMBANGUNAN PERTAHANAN INDONESIA (ANALISIS*

*KERJASAMA MILITER AS-INDONESIA*). (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).

Anwar, S., 2018. Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 4(2), pp.71-94.

Pratewa, L., 2017. *KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA TERKAIT PERAN TNI DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN BATAS-BATAS NEGARA* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).